

# PERUBAHAN PPAS T.A 2023

## TIM ANGGARAN PEMERINTAH KAB. MAROS



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, yang sebelumnya diawali dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Kabupaten Maros Nomor 57/NKB/918/VIII/2022 dan 04/NK/DPRD/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Rancangan perubahan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Rancangan Perubahan PPAS yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian diserahkan kepada Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk dibahas bersama. Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan diperoleh Nota Kesepakatan Bersama Perubahan PPAS Tahun 2023, dan ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Perubahan PPAS Kabupaten Maros Tahun 2023 memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Dengan demikian pembagian plafon anggaran bisa lebih mengarah kepada kebijakan berdasarkan program prioritas atau *Money Follow Program* dan tentunya diharapkan bahwa penggunaan anggaran masing-masing program bisa lebih transparan dan akuntabel.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Menetapkan plafon anggaran terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD;
2. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023;
3. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
  27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 4);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8);
  35. Peraturan Bupati Maros Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 38);

36. Peraturan Bupati Maros Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 130), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 24);
37. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1176/XII/Tahun 2022 tentang Estimasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Tahun 2024;
39. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 50.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022.

**BAB II**  
**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berikut ringkasan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**  
**Kabupaten Maros**

KODE REKENING	URAIAN	APBD T.A. 2023	RANCANGAN APBD-P 2023	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>296,932,440,614</b>	<b>308,082,440,614</b>	<b>11,150,000,000</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	172,030,000,000	176,180,000,000	4,150,000,000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	15,685,000,000	20,685,000,000	5,000,000,000
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,033,936,654	11,033,936,654	-
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	98,183,503,960	100,183,503,960	2,000,000,000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,140,859,806,000</b>	<b>1,157,187,814,249</b>	<b>16,328,008,249</b>
<b>4.2.01</b>	<b>TRANSFER PUSAT</b>	<b>1,076,755,353,000</b>	<b>1,077,740,991,115</b>	<b>985,638,115</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,000,638,551,000</b>	<b>1,001,624,189,115</b>	<b>985,638,115</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	15,215,628,000	16,201,266,115	985,638,115
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	695,261,651,000	695,261,651,000	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	104,026,463,000	104,026,463,000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	186,134,809,000	186,134,809,000	-
<b>4.2.01.02</b>	<b>DANA INTENSIF DAERAH (DID)</b>	-	-	-
<b>4.2.01.05</b>	<b>DANA DESA</b>	<b>76,116,802,000</b>	<b>76,116,802,000</b>	-
<b>4.2.02</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>64,104,453,000</b>	<b>79,446,823,134</b>	<b>15,342,370,134</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	56,804,453,000	64,146,823,134	7,342,370,134
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7,300,000,000	15,300,000,000	8,000,000,000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,437,792,246,614</b>	<b>1,465,270,254,863</b>	<b>27,478,008,249</b>

<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>43,896,406,000</b>	<b>119,112,762,521</b>	<b>75,216,356,521</b>
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	43,896,406,000	119,112,762,521	75,216,356,521
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>1.481.688.652.614</b>	<b>1.584.383.017.384</b>	<b>102.694.364.770</b>

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Maros diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp27.478.008.249,00** menjadi **Rp1.465.270.254.863,00** pada perubahan anggaran tahun 2023.

## BAB III

### PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Dalam perkembangannya, perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah, maka perubahan prioritas belanja daerah tahun 2023 dimungkinkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan 2023 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Infrastruktur Wilayah dan Peningkatan Kualitas SDM”**. Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun 2022, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah:

**Tabel 3.1**

#### **Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Maros Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan	
		Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase lokasi rawan pangan yang ditangani	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Mendapatkan Pembinaan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
		Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Berkinerja Baik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata - Rata Lama Kunjungan Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif Lokal Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Investasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		Pengembangan Ekspor	Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan	Sekretariat Daerah	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Badan Pendapatan Daerah	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	skpd pelaksana	Keterangan
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial	Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
		Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan	Sekretariat Daerah	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai	Dinas Kesehatan	
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pendidikan	Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan	Sekretariat Daerah	
		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Anak Yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	skpd pelaksana	Keterangan
		Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan	
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		Kepegawaian Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	skpd pelaksana	Keterangan
		Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan Ber IMB per satuan bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan	
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan	
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan	
		Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan	
		Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan	
		Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
		Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas wilayah yang tertutup pepohonan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	skpd pelaksana	Keterangan
		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Cakupan Layanan Kebencanaan Sesuai SPM Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	
6	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
		Kepegawaian Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan keuangan sesuai target	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	skpd pelaksana	Keterangan
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh OPD	
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Tabel 3.2**

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua OPD	
		Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan	Sekretariat Daerah	
		Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan		
		Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang – Undangan	Sekretariat DPRD	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD		
		Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan keuangan sesuai target	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah		
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Badan Pendapatan Daerah	
		Kepegawaian Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		
		Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelanggaran Pegawai	Inspektorat	
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tindak lanjut temuan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Seluruh Kecamatan	
		Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
		Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas		
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik		
		Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
		Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Dokumen Arsip Yang Diakuisisi dan Terpelihara		
		Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Arsip Yang Menjadi Bahan Informasi		
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi		
		Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE		
		Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa		
		Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan Database Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
		Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK		
		Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan		
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kunjungan Wisata	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan	
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
		Pengembangan Permukiman	Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi		
		Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan Ber IMB per satuan bangunan		
		Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)		
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW		
		Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat		
		Pengelolaan Pelayaran	Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/pelabuhan perahu penyeberangan		
		Pengembangan Perumahan	Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar Dan Kualifikasi SPM Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	
		Kawasan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata		
		Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh		
		Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Luas areal tanah cadangan yang tersedia untuk kawasan transmigrasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	
3	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Penataan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa Maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		
		Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan RTRW	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan	
		Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee		
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah garapan		
		Pemberdayaan Sosial	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial		
		Rehabilitasi Sosial	Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial	Dinas Sosial	
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		
		Penanganan Bencana	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan		
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi Secara Aktif Dalam Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
		Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3		
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita		
		Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase lokasi rawan pangan yang ditangani		
		Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan		
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		Perlindungan Perempuan	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan melibatkan Perempuan Yang Diselesaikan mulai dari tingkat		
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT		
		Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan Pembangunan		
		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Anak Yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak		
		Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan melibatkan Anak Yang Diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan		
		Pengendalian Penduduk	Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk		
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Akseptor KB		
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		
5	Pembangunan Manusia	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengelolaan Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal		
		Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan		
		Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal		
		Pembinaan Sejarah	Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal		
		Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan		
		Pengelolaan Permuseuman	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun		
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai	Dinas Kesehatan	
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan		
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar	RSUD La Palaloi	
		Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		
		Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	
		Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		
		Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan		
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif		
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	
		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi		
		Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
		Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
		Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah		
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Berkategori Sehat		
		Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Berkinerja Baik		
		Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif		
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		
		Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas		
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran		
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran		
		Pengembangan Ekspor	Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan		
		Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen		
		Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri		
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Investasi		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
		Promosi Penanaman Modal	Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi		
		Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu		
		Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal		
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata - Rata Lama Kunjungan Wisata		
		Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata		
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif Lokal Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual		
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif		
		Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah	
		Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		
		Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		
		Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen		
		Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Mendapatkan Pembinaan		
		7	Pelestarian lingkungan hidup		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	
Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				
Pengelolaan Keanekaragamanhayati (KEHATI)	Persentase luas wilayah yang tertutup pepohonan				
Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Volume Limbah B3 yang tertangani sesuai ketentuan berlaku			DPUTRPP	
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan			DPKPLH	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Tentang Lingkungan Hidup	DPUTRPP	
		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Lingkungan Hidup	DPKPLH	
		Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan		
		Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani		

## BAB IV

### PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN

#### 4.1. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan proyeksi perubahan anggaran pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, maka disusun perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti pada table 4.1 berikut :

TABEL 4.1

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA T.A 2023

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU		
		APBD 2023	RAPBD-P 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	424,106,221,485	450,873,616,057	26,767,394,572
2	DINAS KESEHATAN	166,363,881,060	171,739,280,326	5,375,399,266
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI	103,524,730,074	127,376,879,488	23,852,149,414
4	DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	204,287,262,196	223,020,554,540	18,733,292,344
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	19,050,337,746	19,072,923,486	22,585,740
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14,011,203,971	14,401,931,358	390,727,387
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17,212,740,684	17,472,261,758	259,521,074
8	DINAS SOSIAL	6,410,408,952	6,964,480,017	554,071,065
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12,349,510,175	12,550,344,928	200,834,753

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU		
		APBD 2023	RAPBD-P 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,896,873,068	6,117,636,374	220,763,306
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7,033,431,215	7,441,054,277	407,623,062
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	11,659,526,475	12,014,697,207	355,170,732
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11,446,927,024	13,991,078,002	2,544,150,978
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	9,543,518,529	9,564,958,566	21,440,037
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6,398,691,391	6,435,663,590	36,972,199
16	DINAS PERIKANAN DAERAH	18,706,031,761	19,035,429,398	329,397,637
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	16,532,154,609	20,710,458,420	4,178,303,811
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	29,435,647,031	30,073,645,572	637,998,541
19	SEKRETARIAT DAERAH	38,756,919,731	39,400,198,397	643,278,666
20	SEKRETARIAT DPRD	38,380,800,920	38,727,483,375	346,682,455
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7,615,545,613	7,296,565,931	(318,979,682)
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	207,034,382,307	208,142,327,243	1,107,944,936
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	12,629,677,266	12,839,497,824	209,820,558
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8,239,977,570	8,386,153,494	146,175,924
25	INSPEKTORAT KABUPATEN	11,155,656,705	11,127,522,566	(28,134,139)
26	KECAMATAN MAROS BARU	6,350,663,114	6,385,771,684	35,108,570
27	KECAMATAN BANTIMURUNG	4,842,058,536	4,972,286,154	130,227,618
28	KECAMATAN CAMBA	4,667,357,235	4,562,013,424	(105,343,811)
29	KECAMATAN MALLAWA	3,369,830,723	3,381,976,796	12,146,073

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU		
		APBD 2023	RAPBD-P 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
30	KECAMATAN TANRALILI	4,032,829,866	3,848,871,732	(183,958,134)
31	KECAMATAN BONTOA	3,735,298,699	3,750,136,374	14,837,675
32	KECAMATAN TURIKALE	11,790,938,461	11,922,823,049	131,884,588
33	KECAMATAN MARUSU	2,538,523,298	2,595,275,259	56,751,961
34	KECAMATAN LAU	8,268,784,211	8,138,119,618	(130,664,593)
35	KECAMATAN CENRANA	2,417,064,439	2,498,969,554	81,905,115
36	KECAMATAN MONCONGLOE	2,429,660,166	2,629,842,960	200,182,794
37	KECAMATAN TOMPOBULU	2,596,207,632	2,737,273,331	141,065,699
38	KECAMATAN SIMBANG	2,601,302,351	2,547,063,256	(54,239,095)
39	KECAMATAN MANDAI	6,374,137,322	6,412,957,246	38,819,924
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,891,939,003	23,222,994,753	17,331,055,750
<b>TOTAL</b>		<b>1,479,688,652,614</b>	<b>1,584,383,017,384</b>	<b>104,694,364,770</b>

#### 4.2. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2023

Belanja pegawai, barang dan jasa, hibah sosial modal tidak terduga dan belanja transfer merupakan komponen belanja daerah yang penggunaannya tidak diperuntukkan secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan, perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja tersebut diproyeksikan mengalami Peningkatan senilai **Rp104.694.364.770,00** menjadi **Rp1.584.383.017.384,00** pada perubahan anggaran tahun 2023. Perubahan plafon anggaran sementara untuk Belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, sosial, modal, tidak terduga dan belanja transfer seperti disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 4.2****PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI,  
BARANG DAN JASA, HIBAH, MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA  
TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	610.068.956.568	622.151.240.943	12.082.284.375	1.98
2	BELANJA BARANG DAN JASA	360.425.409.200	382.399.692.965	21.974.283.765	6.10
3	BELANJA HIBAH	16.663.068.619	45.961.520.032	29.298.451.413	175.83
4	BELANJA BANTUAN SOSIAL		835.691.400	835.691.400	100
5	BELANJA MODAL	341.870.095.627	382.373.749.444	40.503.653.817	11.85
6	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0%
7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	147.661.122.600	147.661.122.600	-	0%
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.479.688.652.614</b>	<b>1.584.383.017.384</b>	<b>104.694.364.770</b>	

## BAB V

### RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada Perangkat Daerah

Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp119.112.762.521,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp75.216.356.521,00**.

**1. Penerimaan Pembiayaan**, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan anggaran Tahun 2023, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp119.112.762.521,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok 2023 sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp75.216.356.521,00**. dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Pada perubahan anggaran Tahun anggaran 2023 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp119.112.762.521,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp75.216.356.521,00**. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut;
  - Kas di Daerah senilai **Rp20.025.306.919,59**
  - Kas di BLUD senilai **Rp19.783.268.393,00**
  - Kas Dana BOS senilai **Rp48.434.360,00**

**2. Pengeluaran Pembiayaan**, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2023, Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp0,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2023 yaitu **Rp2.000.000.000,00** maka Alokasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan senilai **Rp2.000.000.000,00**.

- **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Daerah ditargetkan sebesar **nihil** pada perubahan anggaran tahun 2023.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dibuat, untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

KETUA DPRD MAROS

H.A. PATARAI AMIR, SE

Maros, Juli 2023

BUPATI MAROS,

H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H